



Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Kegiatan Prioritas Nasional LKPP

Biro Perencanaan dan Keuangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Triwulan I
2024

RINGKASAN CAPAIAN TW I

2024



Sasaran Strategis

78,89

Nilai RB

% Realisasi Belanja
UMK-K
(progress)

23,27%

% Realisasi Belanja
PDN
(progress)

10%

Jumlah K/L/Pemda
dengan Tata Kelola
Pengadaan "Baik"
(progress)

87,27%

Sasaran Program

5

Indikator
telah
tercapai

9

Indikator
belum
tercapai

Rincian Output Prioritas Nasional (PN)

Pagu Anggaran

Rp 34,42 M

UKPBJ yang mencapai
kematangan level 3

90,60%

346 K/L/Pemda

Produk masuk
E-Catalogue

59,02%

5.902.774 Produk

Realisasi Anggaran

24,54%

Rp 8,45 M

SPSE Terpusat

25%

339 Lembaga

Sistem *E-purchasing*
terintegrasi

22%

Sistem perencanaan
PBJP terintegrasi

21%

Sistem money
PBJP terintegrasi

21%

BAB I

PENDAHULUAN

A. TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LKPP 2020-2024

Visi dan misi LKPP disusun sebagai upaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya visi dan misi tersebut diintegrasikan ke dalam Renstra LKPP 2020-2024. Visi dan misi LKPP dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) LKPP Tahun 2020- 2024 dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

1. Target Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, LKPP telah merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator. Berikut adalah target dari tiap-tiap indikator Sasaran Strategis LKPP tahun 2024:

Unit Organisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target
D2.1	1. Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	1.1 Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Persen	40%
		1.2 Persentase realisasi belanja pengadaan PDN	Persen	90%
D2.1 dan D3.1	2. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2.1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	K/L/Pemda	155
BHOSDM	3. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	3.1 Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	80,10

2. Target Sasaran Program

Tahun 2024, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2023, LKPP menetapkan 8 (delapan) Sasaran Program yang mencakup 14 (empat belas) indikator yang tersebar ke seluruh Unit Organisasi Eselon I. Berikut adalah penjabaran atas target dari setiap indikator Sasaran Program:

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024
D1	01-Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ	Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ	Persen	21
		Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ	Nilai	22,3
	04-Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ	Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ	Predikat	Baik
D2	02-Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ	Persentase PDN yang ada dalam marketplace	Persen	80
		Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace	Persen	40
	05-Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal	K/L/Pemda	382
D3	06-Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	K/L/Pemda	155
		Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	K/L/Pemda	382
D4	03- Meningkatkan K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	Persen	95
		Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	Persen	95
	07-Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	Persen	52

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024
SETTAMA	08-Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai AKIP	Predikat	Sangat Baik
		Opini BPK	Opini	WTP
		Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal	Persen	84

B. TARGET PRIORITAS NASIONAL (PN) LKPP 2023

Berdasarkan Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, LKPP memiliki peran dalam mendukung dua Prioritas Nasional (PN), yakni (i) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1) dan (ii) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7). Berdasarkan PKT Kepala LKPP Tahun 2024, rincian indikator Rincian Output dan target yang masuk dalam Program Prioritas Nasional (PN) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Indikator	Satuan Target	Target	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1 Produk yang Masuk <i>E-Catalogue</i>	Produk	10.000.000
		1.2 Sistem <i>e-purchasing</i> yang terintegrasi	Sistem Informasi	1
2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2.1 Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	Sistem Informasi	1
		2.2 Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	Sistem Informasi	1
		2.3 SPSE Terpusat	LPSE	450
		2.4 UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3	UKPBJ	319

BAB II

PROGRES TRIWULAN I

A. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Capaian Indikator Sasaran Strategis

Unit Organisasi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Target	Target	Realisasi/Progres s.d Maret
D21	1 Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	1.1 Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Persen	40	23,27 Persen Berdasarkan data Rapor Kinerja Pengadaan per 1 April 2024 transaksi belanja produk UMK adalah sebesar 23.27%
		1.2 Persentase realisasi belanja pengadaan PDN	Persen	90	87.27 Persen Berdasarkan data Rapor Kinerja Pengadaan per 1 April 2024 transaksi belanja produk dalam negeri adalah sebesar 87.27%
D21 dan D31	2 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2.1 Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	K/L/Pemda	155	Progres: 10% Sedang dalam proses perhitungan karena data pemanfaatan sistem pengadaan sedang dalam perhitungan setelah batas waktu 31 Maret
BHOSDM	3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	3.1 Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	80,10	78,89 dengan kategori BB

Keterangan:

- Telah selesai dilakukan pengukuran

2. Capaian Indikator Sasaran Program

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi/Progres s.d Maret
D1	01- Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ	Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ	Persen	21	<p>Progres: 15%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PKP Batch 1 di Bangka Belitung 2. Pelaksanaan PKP Batch 2 di Kupang 3. Pelaksanaan PKP Batch 3 di Ambon 4. Pelaksanaan PKP Batch 4 di Manado 5. Pelaksanaan PKP Batch 5 di Bali <p>Kegiatan Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan usulan Program Prioritas terkait UMKM. 2. Pembahasan Aplikasi Bisa Pengadaan, Koordinasi untuk Peningkatan Keamanan Informasi pada Aplikasi Bisa Pengadaan
				Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ	Nilai

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi/Progres s.d Maret
					Pengadaan
	04- Meningkatkan kualitas implementasi regulasi PBJ	Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ	Predikat	Baik	Progres: 30% 1) Persiapan diseminasi survey Indeks Efektivitas kepada Stakeholder. 2) Telah dilakukan survey di 3 lokasi yakni Bali, Medan dan Kupang dengan total 68 responden. 3) Telah dilakukan survey untuk wilayah timur indonesia yang dilakukan di kota makassar
D2	02- Meningkatkan jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ	Persentase PDN yang ada dalam marketplace	Persen	80	89,2 Persen Persentase PDN yang ada dalam marketplace sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar 89,2% yang terdiri dari : - Produk Lokal TKDN 1.257.782 (19%) - Produk Lokal Non TKDN 4.644.992 (70,2%)
		Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace	Persen	40	83,04 Persen Persentase UMKK yang ada dalam marketplace sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar 83,04% yang terdiri dari : - Mikro 2.267.946 (34,3%) - Kecil 2.727.380 (41,2%) - Menengah 498.849 (7,54%)
	05-Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal	K/L/ Pemda	382	369 K/L/Pemda K/L dan Pemda yang sudah mengumumkan RUP lebih dari 70% mencapai 369 K/L dan

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi/Progres s.d Maret
	informasi pengadaan				Pemda dari total 630 K/L dan Pemda.
D3	06-Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	K/L/Pemda	155	159 K/L/Pemda <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Obrolan Rabu Seputar Kebijakan JF PPBJ (Orkestra) dengan tema Perpindahan JF PPBJ pada 20 dan 27 Maret 2024 - Pelaksanaan Penyusunan rekomendasi pengangkatan untuk peserta uji kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain periode 2 dan 3 Tahun 2024 - Pembahasan Kompetensi Teknis JF Pengelola PBJ Jenjang Madya - Pembahasan Kebijakan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
		Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang maturitas minimal level 3	K/L/Pemda	382	331 K/L/Pemda Sebanyak 331 UKPBJ mencapai Maturitas Level 3 (Proaktif), dengan rincian: a) 146 UKPBJ dengan Maturitas Level 3 (untuk 9 variabel dinyatakan Proaktif), terdiri atas 20 UKPBJ K/L dan 123 UKPBJ Pemda; dan b) 185 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 (Level 3 untuk 8 dari 9 variabel pada aplikasi SIMKU), terdiri atas

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi/Progres s.d Maret
					25 UKPBJ K/L dan 160 UKPBJ Pemda
D4	03- Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	Persen	95	83,01 Persen Sampai Maret 2024, K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN: 5 K/L Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN: 518 Pemda Total KLPD yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN: 523 KLPD 523/630 = 83,01% KLPD
		Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	Persen	95	81,90 Persen Sampai Maret 2024, K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk UMK: 5 K/L Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk UMK: 511 Pemda Total KLPD yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk UMK: 516 KLPD 516/630 = 81,90% KLPD

Unit Organisasi	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi/Progres s.d Maret
	07- Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	Persen	52	53,07 Persen Perhitungan berasal dari : (% K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri + % efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan)/2 % K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri : 20.15% Nilai % efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan) =85.99% Capaian : $(19.2+85.99)/2 = 53.07\%$
SETTAMA	01- Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai AKIP	Predikat	Sangat Baik	70,89 dengan Predikat BB (Sangat Baik)
		Opini BPK	Opini	WTP	Progres: 25% - telah diterbitkan laporan keuangan <i>unaudited</i> TA 2023 - sedang dilakukan pemeriksaan laporan keuangan <i>unaudited</i> TA 2024 oleh BPK
		Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal	Persen	84	Progres: 25% Berdasarkan perhitungan terakhir, dari 21 indikator tata kelola internal LKPP, mendapatkan hasil $99/122 = 81$ Persen (capaian 2023)

Keterangan:

- Indikator telah mencapai target

Terdapat beberapa kendala/permasalahan terhadap Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program dalam rangka mencapai target. Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Terhadap indikator Sasaran Program “Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ” terdapat kendala terkait dengan penarikan data pada Dashboard Monev Katalog yang seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan sistem/server yang berat. Selain itu, untuk data PDN dan UMKK bersifat kumulatif.
- b. Terhadap indikator Sasaran Program “Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ” terdapat kendala yaitu:
 - 1) Indikator “Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN” pada awal tahun, belanja pengadaan di K/L/PD masih tergolong sedikit dan belum semua tercatat dalam sistem sehingga data belanja PDN belum mencapai puncaknya.
 - 2) Indikator “Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K” pada awal tahun, belanja pengadaan di K/L/PD masih tergolong sedikit dan belum semua tercatat dalam sistem sehingga data belanja produk UMK belum mencapai puncaknya.
- c. Terhadap indikator Sasaran Program “Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan” dari 369 K/L/PD tersebut, masih terdapat 160 K/L dan Pemda yang mengumumkan RUP melebihi nilai pagu belanja pengadaannya atau lebih dari 100%.
- d. Terhadap indikator Sasaran Program “Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ” terdapat peserta perpindahan dari jabatan lain (antar JF) dari Kab Pesawaran yang belum memiliki PAK sehingga proses penyusunan rekomendasi pengangkatan lebih lama.

B. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL (PN)

1. Produk yang Masuk E-Catalogue

a. Definisi Perhitungan

Merupakan jumlah Produk Dalam Negeri (PDN) yang tayang pada katalog elektronik

b. Capaian Fisik dan Penjelasan

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	PIC
Produk yang masuk e-catalogue	Produk	10.000.000	5.902.774	59.02%	D2.3 (katalog)

Data Tarikan PDN didasarkan pada data dari *Dashboard* Monev Katalog Per 31 Maret 2024, produk dalam negeri yang tayang pada Katalog Elektronik sebesar 5.902.774 produk yang terdiri dari :

- 1) Produk Lokal TKDN 1.257.782

2) Produk Lokal Non TKDN 4.644.992

c. Kendala yang dihadapi

Terdapat sekitar 2 juta produk pada Katalog Elektronik yang masa tayang produknya habis di akhir tahun 2023 dan penyedia yang produknya sudah habis masa tayangnya tersebut, belum memperpanjang masa tayangnya.

d. Upaya yang telah dilakukan

- 2) Melakukan *onboarding* penyedia
- 3) Melaksanakan bimtek kerjasama dengan PT. Telkom untuk Penyedia.

e. Rencana kegiatan TW II s.d TW IV

- 1) Melakukan *onboarding* penyedia
- 2) Melaksanakan bimtek kerjasama dengan PT. Telkom untuk penyedia
- 3) Melakukan monitoring terhadap masa belaku produk yang tayang

2. Sistem *e-purchasing* yang terintegrasi

a. Definisi Perhitungan

Merupakan sistem *e-purchasing* dengan ruang lingkup integrasi dengan K/L/Pemda, maupun pengembangan fitur baru maupun yang sudah ada.

b. Capaian Fisik dan Penjelasan

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	PIC
Sistem <i>E-Purchasing</i>	Sistem	1	-	22%	D2.3
Terintegrasi	Informasi				

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Persiapan implementasi hasil integrasi data SHE
- 2) Pengembangan fitur Mini Kompetisi Konstruksi
- 3) Persiapan pengembangan integrasi data Sertifikat Halal
- 4) Pengembangan fitur Pelanggaran/Sanksi Penyedia

c. Kendala yang dihadapi

- 1) Menunggu MoU/PKS dengan kemenESDM terkait integrasi data SHE
- 2) Menunggu MoU/PKS dengan Kemnterian Agama terkait integrasi data Sertifikat Halal
- 3) Menunggu aturan terbaru terkait penggunaan epurchasing oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma)

d. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Koordinasi secara intensif dengan Kementerian Agama dan Kementerian ESDM

- 2) Koordinasi dengan pihak terkait perihal penyusunan regulasi penggunaan *epurchasing* oleh non K/L/PD yaitu BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma

e. Rencana kegiatan TW II s.d TW IV

- 1) UAT pengembangan fitur mini kompetensi
- 2) Pengembangan fitur sertifikat halal dengan Kementerian Agama
- 3) Koordinasi dengan pihak terkait perihal penyusunan regulasi penggunaan *epurchasing* oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/ BUMDesma)

3. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi

a. Definisi Perhitungan

Merupakan Integrasi aplikasi SIRUP dengan sistem lainnya

b. Capaian Fisik dan Penjelasan

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	PIC
Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	Sistem Informasi	1	-	21%	D2.1

Integrasi dengan aplikasi SAKTI dan SIPD RI dilakukan sepanjang tahun, sehubungan dengan aplikasi SAKTI dan SIPD RI yang dinamis sehingga dibutuhkan pengembangan dan penyesuaian API dan sistem pada SIRUP. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Terselenggaranya layanan *helpdesk* SiRUP
- 2) Telah dikirimkan surat permohonan pembaruan PKS dengan kementerian keuangan terkait dengan integrasi SiRUP dengan SAKTI
- 3) Dilakukan perbaikan minor dari integrasi SAKTI
- 4) Dilakukan Kegiatan *Coaching Clinic* input RUP untuk Pemda

c. Kendala yang dihadapi

- 1) Modul dan fitur pada aplikasi SAKTI dan SIPD RI yang dinamis sehingga diperlukan penyesuaian sesuai dengan dinamika dua aplikasi tersebut
- 2) Banyak Pemda maupun K/L yang memiliki aplikasi yang memiliki fungsi yang serupa dengan SIRUP x SAKTI x SIPD RI sehingga diperlukan effort lebih besar dalam mengintegrasikan sistem-sistem tersebut dengan SiRUP.

d. Upaya yang telah dilakukan

D21 telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan cq. DJPb tanggal 19 Februari perihal pembaruan PKS integrasi SIRUP x SAKTI.

e. Rencana kegiatan TW II s.d TW IV

- 1) Dalam waktu dekat akan dilakukan launching aplikasi katalog ver. 6

- 2) Identifikasi proses bisnis pada aplikasi SIRUP

4. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi

a. Definisi Perhitungan

Merupakan Integrasi aplikasi AMEL dengan sistem lainnya.

b. Capaian Fisik dan Penjelasan

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	PIC
Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	Sistem Informasi	1	-	21%	D2.1

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Terselenggaranya Layanan Helpdesk Amel
- 2) Update modul amel v3.0u20240201
- 3) Integrasi AMEL dengan SAKTI dan SIPD RI

c. Kendala yang dihadapi

- 1) Belum dapat melakukan penarikan data pembayaran pada aplikasi SIPD RI dikarenakan adanya permasalahan pada aplikasi SIPD RI
- 2) masih banyaknya perbaikan sistem pada SIPD RI dan SAKTI
- 3) SDM pengelola AMEL yang berubah

d. Upaya yang telah dilakukan

Berkoordinasi dengan tim SIRUP untuk mengoptimalkan integrasi data yang ada pada aplikasi SIRUP.

5. SPSE Terpusat

a. Definisi Perhitungan

Merupakan jumlah LPSE yang menggunakan 21 layanan atau *service* yang dikembangkan oleh LKPP.

b. Capaian Fisik dan Penjelasan

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	PIC
SPSE Terpusat	Layanan	450	339	25%	D2.2 (SPSE)

Aplikasi SPSE sebagai sistem informasi untuk Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, dan Pengelolaan Penyedia. D.2.2 sudah

mengoptimalkan 21 layanan atau *service* SPSE Terpusat dan melakukan sosialisasi aplikasi SPSE melalui Bimtek SPSE di It.2 LKPP.

c. Kendala yang dihadapi

- 1) Masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan *service-service* dari SPSE terpusat.
- 2) Kurangnya komitmen dari beberapa LPSE untuk mengimplementasi aplikasi SPSE Terpusat.
- 3) Koordinasi dalam menjalin kerja sama dengan *stakeholder* dalam proses integrasi SPSE Terpusat.
- 4) Mendorong pemenuhan standarisasi LPSE.
- 5) Sudah tidak adanya anggaran konsultan pada tahun 2024.
- 6) Terbatasnya SDM.

d. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Mendorong pemanfaatan *services* SPSE terpusat dan koordinasi dengan PIC LPSE untuk pemenuhan standarisasi LPSE.
- 2) Mengevaluasi *service* SPSE yang sudah ada.

e. Rencana kegiatan TW II s.d TW IV

- 1) Sosialisasi/Bimtek penggunaan SPSE
- 2) Mengoptimalkan *service* SPSE Terpusat yang masih kurang seperti: *service* latihan dan standarisasi.

6. UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3

a. Definisi Perhitungan

Merupakan UKPBJ K/L/Pemda yang telah memiliki status pemenuhan 8/9 dan 9/9.

b. Capaian Fisik dan Penjelasan

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	PIC
UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	UKPBJ	382	346	90,60%	D3.1

Sebanyak 346 UKPBJ mencapai Maturitas Level 3 (Proaktif), dengan rincian:

- 1) 149 UKPBJ dengan Maturitas Level 3 (untuk 9 variabel dinyatakan Proaktif), terdiri atas 21 UKPBJ K/L dan 128 UKPBJ Pemda; dan
- 2) 197 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 (Level 3 untuk 8 dari 9 variabel pada aplikasi SIMKU), terdiri atas 26 UKPBJ K/L dan 171 UKPBJ Pemda

c. Kendala yang dihadapi

- 1) Terkendala pada adanya daerah pemekaran baru wilayah timur
- 2) Pergantian personal di setiap UKPBJ maupun tim mentor internal LKPP

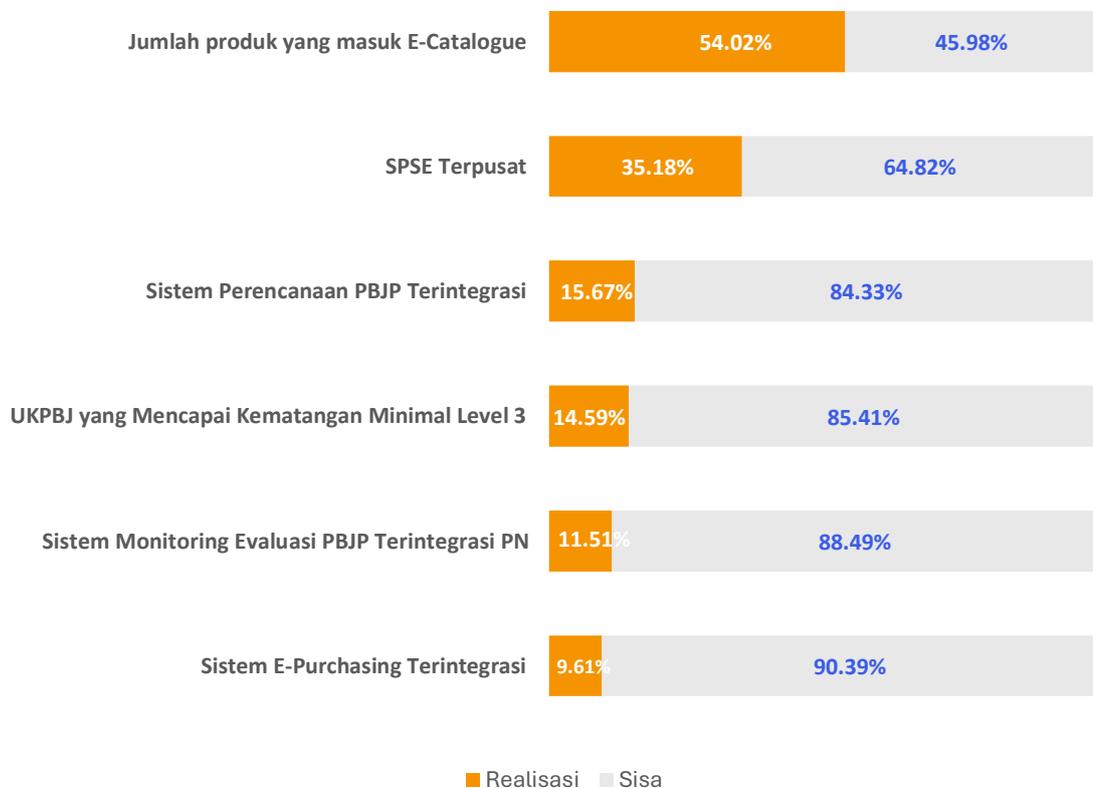
d. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Percepatan pembentukan UKPBJ di wilayah timur
- 2) Pembentukan mentor untuk membantu kab/kota untuk mencapai kematangan
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi
- 4) *Coaching* dan *mentoring* secara luring maupun daring

e. Rencana kegiatan TW II s.d TW IV

- 1) *Coaching Clinic* Pendampingan Penyusunan Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif secara luring maupun daring pelaksanaan sejak bulan April
- 2) Bimtek Penyusunan Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif (4 kali kegiatan untuk 15 K/L/Pemda yang akan dilaksanakan pada bulan Mei)
- 3) Mentoring dan Kolaborasi Kerja Sama antar UKPBJ dalam rangka Pendampingan Penyusunan Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif oleh Provinsi kepada Kab/Kota (bulan Juni-Sept)
- 4) Rapat Koordinasi JF dan UKPBJ yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024

C. REALISASI ANGGARAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL



Detail penyerapan anggaran pada Rincian Output yang mendukung PN adalah sebagai berikut:

No	Prioritas Nasional	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Jumlah produk yang masuk <i>E-Catalogue</i>	3.216.879.000	1.737.818.745	1.479.060.255
2	Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1.226.882.000	192.261.389	1.034.620.611
3	Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi PN	1.112.285.000	127.973.057	984.311.943
4	SPSE Terpusat	13.531.835.000	4.760.097.117	8.771.737.883
5	UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3)	3.157.491.000	460.626.906	2.696.864.094
6	Sistem <i>E-Purchasing</i> Terintegrasi	12.183.968.000	1.171.006.523	11.012.961.477
TOTAL		34.429.340.000	8.449.783.737	25.979.556.263

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari 4 (empat) indikator Sasaran Strategis terdapat 1 (satu) indikator yang telah selesai dihitung namun **belum** mencapai target yaitu indikator Sasaran Strategis Nilai Reformasi Birokrasi yang memiliki nilai realisasi 78,89 dengan besaran capaian 98,49% dari target sebesar 80,10.
2. Dari 14 (empat belas) indikator Sasaran Program terdapat 5 (lima) indikator yang telah mencapai target, sedangkan 9 (sembilan) indikator lainnya masih dalam progres. Adapun 5 (lima) indikator yang telah mencapai target yaitu:
 - a. Persentase PDN yang ada dalam *marketplace* sebesar 89,2 Persen;
 - b. Persentase produk UMK-K yang ada dalam *marketplace* sebesar 83,04 Persen;
 - c. Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten sebanyak 159 K/L/Pemda;
 - d. Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan sebesar 53,07 Persen; dan
 - e. Nilai AKIP dengan predikat Sangat Baik (BB).
3. Dari 6 (enam) Indikator Output yang termasuk dalam Program Prioritas Nasional, belum terdapat indikator yang realisasinya telah mencapai target. Namun, terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki besaran $\geq 25\%$ yaitu:
 - a. Produk yang Masuk *E-Catalogue* dengan besaran capaian 59,02%;
 - b. SPSE terpusat dengan besaran capaian 25%; dan
 - c. UKPBJ yang mencapai kematangan minimal level 3 dengan besaran capaian 90,60%.

B. REKOMENDASI

1. Terhadap capaian tahun sebelumnya (tahun 2023), terdapat 2 (dua) indikator Sasaran Strategis yang **belum** mencapai target yaitu indikator Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik" dan indikator Nilai Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan perhatian khusus dari setiap unit organisasi pengampu agar dapat mengoptimalkan pencapaiannya di tahun 2024.
2. Terhadap indikator Sasaran Strategis Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik" diperlukan koordinasi secara berkala antara unit organisasi pengampu agar memiliki target lokus yang sama dalam rangka mendorong K/L/Pemda agar dapat memenuhi kriteria tata kelola pengadaan "Baik" yang meliputi pemanfaatan sistem pengadaan yang "optimal", pemenuhan SDM yang "Kompeten", dan UKPBJ yang mencapai maturitas level 3.
3. Terhadap indikator Sasaran Strategis "Nilai Reformasi Birokrasi" diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait capaian yang telah selesai namun belum mencapai target.

4. Terhadap RO Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi, agar melakukan akselerasi proses penyusunan peraturan terkait mini kompetisi konstruksi dan non konstruksi serta penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD.
5. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMOM sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing.